

Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan leverage perusahaan terhadap environmental disclosure

Indra Suyoto Kurniawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: indra.suyoto.kurniawan@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance, profitabilitas dan leverage perusahaan terhadap environmental disclosure. Corporate governance di dalam penelitian ini disesuaikan dengan proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan rapat dewan komisaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap environmental disclosure, rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap environmental disclosure, dan proporsi dewan komisaris independen, profitabilitas dan leverage perusahaan tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure.

Kata Kunci: Governance; environmental disclosure

The effect of corporate governance, profitability, and company leverage on environmental disclosure

Abstract

The study aims to determine the effect of corporate governance, profitability and company leverage on environmental disclosure. Corporate governance in this study is adjusted to the proportion of independent commissioners, the size of the audit committee and board of commissioner meetings. The results of this study indicate that the size of the audit committee has a significant negative effect on environmental disclosure, board of commissioner meetings have a significant effect on environmental disclosure, and the proportion of independent commissioners, profitability and company leverage has no effect on environmental disclosure.

Keywords: Governance; environmental disclosure

PENDAHULUAN

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah laba. Padahal tanggung jawab perusahaan tidak hanyalah menghasilkan laba, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Elkington (1997) dalam Wibisono, (2007), menyatakan, perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan “3P” yaitu selain mengejar keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Minimnya kepedulian tanggung jawab pada lingkungan oleh perusahaan publik di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah faktor penting yang harus dipikirkan karena pengelolaan lingkungan yang buruk akan menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana. Lingkungan hidup yang akhir-akhir ini terjadi seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, hujan asam, limbah bahan berbahaya dan beracun serta degradasi keanekaragaman hayati telah menjadi sorotan di dunia internasional dan meresahkan masyarakat dunia. Hal tersebut disebabkan oleh praktik industri yang menggunakan teknologi dan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun serta tidak bertanggung jawab dalam upaya maksimalisasi laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, pada tahun 2014 mengenai status lingkungan hidup Indonesia dalam opini publik menyatakan bahwa kondisi lingkungan di Indonesia dalam bahaya, Mongabay, (2014). Dan menurut Siregar, dkk (2013) di Indonesia, sekitar 15-20 persen dari limbah dibuang dengan baik, akan tetapi sisanya dibuang ke sungai yang tentunya akan menimbulkan banjir. Selain banjir, masalah yang ditimbulkan oleh limbah pabrik adalah pencemaran air sungai yang mengakibatkan kualitas air bersih pun memburuk.

Permasalahan lingkungan yang semakin meningkat telah menjadi perhatian banyak kalangan seperti aktivis lingkungan, investor, pemerintah dan masyarakat umum, maka salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan adalah melalui pengungkapan informasi kinerja lingkungan perusahaan (environmental disclosure). Suratno at al. (2006) dalam Nofianti, dkk (2015), menyatakan bahwa environmental disclosure adalah merupakan salah satu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Environmental disclosure mencakup kinerja yang berkaitan dengan keaneragaman hayati, kepatuhan lingkungan yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa. Menurut Bahtiar dkk (2012) dalam Jayanto dan Astinila (2015) menyatakan bahwa environmental disclosure penting dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Environmental disclosure adalah bagian dari pengungkapan CSR (corporate social responsibility). Pengungkapan CSR merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk senantiasa memberikan perhatian terhadap lingkungan baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial disetiap kegiatan atau operasi yang dilakukan oleh perusahaan, Effendi (2016). Pengungkapan CSR dikelompokkan menjadi 3 tema yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan, Aulia (2015).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia telah menjadi kewajiban bagi perseroan terbatas untuk mengungkapkan dalam laporan keberlanjutan, maupun dalam laporan tahunan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat mandatory, seperti tercermin di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat 1 tertulis bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, pelaksanaan dan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan publik. Namun belum ada peraturan mengenai standar baku pengungkapan informasi lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu menjadikan pengungkapan tanggung

jawab sosial dan lingkungan bervariasi, sehingga format, isi dan luasnya pengungkapan masih bersifat voluntary atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, Aulia (2015).

Environmental disclosure juga sangat berperan dalam mendukung program-program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan seperti PROPER, AMDAL, dan sistem manajemen lingkungan. Salah satu program unggulan pemerintah dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan adalah PROPER. PROPER atau program penilaian peringkat kerja perusahaan adalah program penilaian terhadap pertanggung jawaban usaha dalam mengendalikan pencemaran serta pengelolaan limbah, bahan berbahaya oleh kementerian lingkungan hidup (KLH). Tujuan dari PROPER adalah untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan serta bentuk penataan lingkungan hidup perusahaan Indonesia, Agustina (2015).

Diperlukan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan environmental disclosure ini agar dapat sejalan peraturan yang berlaku, menurut Warnock (2004) secara umum mekanisme yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku manajemen diantaranya adalah melalui mekanisme dari corporate governance. Menurut Prasetianti (2014), Corporate governance adalah tata kelola yang dilakukan oleh stakeholder dalam melakukan kontrol terhadap manajemen, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan transparansi perusahaan. Adanya corporate governance yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga tanggung jawab lingkungan hidup akan diungkapkan dalam annual report Permatasari, (2009).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi environmental disclosure telah banyak dilakukan. Faktor-faktor tersebut seperti ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham, jumlah rapat dewan komisaris, tipe industri, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan sebagainya. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, profitabilitas dan leverage perusahaan.

Menurut Suhardjanto (2010), beberapa aspek penting corporate governance adalah dewan komisaris dan komite audit. Sistem pengawasan pada perusahaan di Indonesia terletak pada dewan komisaris. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan dewan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya. Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap environmental disclosure, Suhardjanto, (2010). Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Menurut Sanjaya (2013), menyatakan bahwa dewan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan image perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya, karena hal tersebut dapat meningkatkan image perusahaan dimata masyarakat.

Komite audit memegang peran yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, karena bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Menurut Sulistyowati (2014), menyatakan bahwa Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Menurut Ariningtika (2013), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Di dalam teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh laba lebih besar, maka akan menyediakan informasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu semakin tinggi profitabilitas semakin luas dalam pengungkapan lingkungan.

Menurut Pambudi (2015), menyatakan bahwa leverage merupakan indikator untuk melihat seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dan mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai aset perusahaan. Effendi, (2012), mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan menjadi semakin sedikit dan sebaliknya, semakin rendah tingkat leverage perusahaan, maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan akan semakin luas.

Objek penelitian ialah perusahaan manufaktur, pemilihan perusahaan manufaktur sebagai Objek penelitian ini dikarenakan perusahaan tersebut jenis perusahaan yang rawan lingkungan. Selain itu Perusahaan manufaktur dalam melakukan aktivitasnya menggunakan sumber daya yang berasal dari lingkungan sekitar dan aktivitas proses produksi yang menghasilkan limbah, sehingga perusahaan tersebut memberikan dampak yang besar baik langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan.

METODE

Variabel dependen yaitu *environmental disclosure*, dan variabel independennya antara lain proporsi dewan komisaris independen ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, profitabilitas dan *leverage*.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

ED (Y)	: Environmental Disclosure
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi
X1	: Proporsi Komisaris Independen
X2	: Ukuran Komite Audit
X3	: Rapat Dewan Komisaris
X4	: Profitabilitas
X5	: <i>Leverage</i>
e	: <i>error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*

Berdasarkan teori agensi perbedaan kepentingan antara principal dan agen merupakan masalah bagi keduanya, sehingga diperlukannya pihak yang secara independen dapat mengawasi kinerja manajemen agar tidak merugikan pemegang saham. Dewan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham maupun kepentingan manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen ini diharapkan dapat bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari manajemen, sehingga semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholder* semakin objektif. Dengan demikian semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) semakin besar karena adanya dorongan yang besar dari para *stakeholder* untuk mengungkapkan pengungkapan lingkungan tersebut semakin luas lagi.

Proporsi komisaris independen diukur dengan perbandingan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi sebesar 0,457 dimana lebih besar dari 0,05, maka hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan bahwa dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan hanya untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu adanya persyaratan yang mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran dewan komisaris.

Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab dewan komisaris independen pada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan manufaktur belum berfungsi sebagaimana mestinya padahal dewan komisaris independen mempunyai pengaruh besar untuk mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas lagi kepada *stakeholder* khususnya adalah pengungkapan lingkungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010), Sulistyowati (2014), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen dengan *environmental disclosure*. Akan tetapi, hasil penelitian ini

bertolak belakang dengan hasil peneliti Suhardjanto dan Permatasari, (2010) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Pengaruh ukuran komite audit terhadap *environmental disclosure*

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 dimana lebih kecil dari 0,05 dengan tanda negatif pada koefisien regresi, maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyowati, (2014) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin kecil *environmental disclosure*. Hal tersebut dikarekan kinerja komite audit dengan jumlah anggota komite audit yang besar kurang efektif dibandingkan dengan jumlah anggota komite audit yang sedikit, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi anggota komite audit dalam mengawasi kinerja manajemen. Selain itu, jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengaruh rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel rapat dewan komisaris menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, maka akan semakin baik pelaksanaan *environmental disclosure*. Dalam rapat tersebut, membahas masalah mengenai arah strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Rapat dewan komisaris yang dilakukan secara berkala dan berbobot akan memberikan nilai tambah terutama dalam meningkatkan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) karena semakin besar frekuensi rapat maka akan semakin sering dewan komisaris mendorong manajemen untuk mengungkapkan *environmental disclosure* semakin luas lagi demi kepentingan *stakeholder*.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Marem (2015) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Suhardjanto (2010), Suhardjanto dan Permatasari, (2010) dan Effendi, (2012), yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan di dalam menghasilkan laba (keuntungan) selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek yang baik di masa yang akan datang. Berdasarkan teori legitimasi, masyarakat senantiasa melakukan tekanan kepada perusahaan agar peduli terhadap masalah lingkungan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mudah dalam menjawab tekanan tersebut karena perusahaan memiliki sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan lingkungan dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Return on Asset (ROA). Tingkat signifikansi probabilitas adalah sebesar 0,260 dimana lebih besar dari 0,05, maka profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* atau hipotesis keempat (H_4) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tidak menggunakan sebagian profitnya untuk meningkatkan kinerja dan pengungkapan lingkungan.

Menurut Angraini, (2006), dalam Effendi, (2012), menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Selain itu berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas dimana undang-undang tersebut mewajibkan setiap perusahaan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jadi meskipun perusahaan dalam keadaan untung maupun rugi harus mengungkapkan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) karena telah menjadi kewajiban bagi perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Suhardjanto (2010) dan Effendi, dkk (2012), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Aulia dan Agustina, (2015), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Pengaruh leverage terhadap environmental disclosure

Leverage merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dan mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai aset perusahaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori *stakeholder*, dimana apabila *leverage* tinggi mengidentifikasi tanggung jawab perusahaan yang besar terhadap para krediturnya. Dengan *leverage* yang tinggi perusahaan akan cenderung untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melunasi hutang dibandingkan dengan melakukan laporan pengungkapan lingkungan. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan *debt to equity ratio* (DER). Tingkat signifikansi *leverage* 0,977 dimana lebih besar dari 0,05, maka *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* atau hipotesis kelima (H₅) ditolak. Hasil pengujian yang menolak hipotesis kelima menunjukkan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Besar kecilnya *leverage* ternyata tidak serta merta mempengaruhi kebijakan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Hal tersebut menyatakan bahwa manajemen dalam membuat *environmental disclosure* tidak semata-mata dipengaruhi oleh *stakeholder* terutama kreditur.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia dan Agustina, (2015), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) dan Effendi, dkk (2012), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *environmental disclosure*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi sebesar 0,457 dimana lebih besar dari 0,05, maka hipotesis pertama (H₁) ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel ukuran komite audit menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 dimana lebih kecil dari 0,05 dengan tanda negatif pada koefisien regresi, maka hipotesis kedua (H₂) diterima.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel rapat dewan komisaris menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga (H₃) diterima.

Berdasarkan hasil analisis dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* yaitu dengan tingkat signifikansi probabilitas adalah sebesar 0,260 dimana lebih besar dari 0,05, maka hipotesis keempat (H₄) ditolak.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi *leverage* 0,977 dimana lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kelima ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F.Z. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media Terhadap Environmental Disclosure. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Aulia dan Agustina. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan Dan Liputan Media Terhadap Environmental Disclosure. Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765.
- Effendi, dkk. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure Pada Perusahaan Yang Listing Di BEI Tahun 2008-2011. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin.

-
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IMB SPSS 23. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jensen M.C And Meckling, WH. 1976. Theory Of The Firm: Majerial Behavior, Agency Casts And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, October, 1976 Vol. 3 No. 4 Pp. 305-360. Sumbe, [Http//Papers.Ssrn.com](http://Papers.Ssrn.com).
- Kasmir. 2011. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro dan Effendi, 2016. Penaruh Kinerja Lingkungan Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Lingkungan. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016.
- Lins, Karl V & Warnock, Francis E. 2004. Corporate Governance And The Sharholder Base. International Finance Discussion Papers.
- Nofianti, dkk. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure Dengan Environmental Performance Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Trikonomika ISSN 1411514 Vol. 14 No. 1 Hal. 38-46.
- Marem, 2015. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugraha, D.E.B. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Profitabilitas, Leverage Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Oktafianti dan Rizki. 2015. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Corporate Environmental Disclosure Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dalam Laporan Tahunan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan.
- Pambudi, W.B. 2015. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profiyabilitas Dan Tipe Industri Terhadap Environmental Disclosure. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Putri, C.D. 2013. Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Dalam Sustainability Report.
- Prasetianti, Nurani. 2014. Pengaruh Media Dan Struktur Corporate Governance Terhadap Kualitas Environmental Disclosure. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sanjaya, T.P. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siregar, Dkk. 2013. Hubungan Antara Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Vol. 4, No. 1. Halaman 63-81.
- Sulistyowati. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Dan Pertambangan Yang Listing Di BEI Tahun 2010-2012). Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014.
- Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Wibisono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Surabaya: Media Grapka.